

EDISI : Selasa, 29 Januari 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

JKN, Masih Banyak Warga yang Tercecer

SINGARAJA - Wacana menerapkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat di Buleleng, rupanya belum berjalan sepenuhnya. Dewan menemukan sejumlah masyarakat di wilayah Kota Singaraja yang belum mengantongi JKN dari pemerintah. Padahal pada tahun ini, 100 persen penduduk Buleleng harus sudah masuk dalam program JKN.

Sejumlah anggota dewan, kemarin (28/1) mendatangi Dinas Sosial Buleleng. "Ini banyak kami temukan di masyarakat, terutama yang kurang mampu. Bukan hanya

di wilayah Tejakula, tapi juga di Kota Singaraja. Padahal, program ini harus sudah bisa dinikmati seluruh masyarakat Buleleng tahun ini. Entah itu mampu atau tidak mampu," papar Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Wiršana di dampingi Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Gde Wisnaya Wisma.

Ia pun mendesak pemerintah mempercepat proses pendataan. Sehingga pada Februari mendatang, jumlah kepesertaan bisa meningkat. Masyarakat pun tak akan kesulitan mengakses layanan kesehatan.

Sementara itu Kabid Perlindungan Jaminan Sosial

Dinas Sosial Buleleng Yayan Sutrisna mengaku belum seluruh masyarakat Buleleng. Dari data Dinsos Buleleng, dari 818.829 penduduk Buleleng, baru 95,4 persen penduduk yang masuk dalam program JKN. Artinya baru 781.162 penduduk saja yang terjangkau. Sementara 37.677 orang lainnya belum masuk dalam program. "Sebenarnya sudah 95,4 persen yang masuk dalam program ini. Bila memang ada yang belum, bisa dilaporkan ke kantor desa. Nanti akan kami daftarkan ke BPJS," kata Yayan. (eps/gup)



EKA PRASETYA/RADAR BALI

BELUM KLOP: Komisi IV DPRD Buleleng saat berada di Dinas Sosial membahas program JKN di Gumi Panji Sakti kemarin.

dia: Radar Bali

Kategori: Perusahaan Daerah

Ajukan BPR 45 dari PD ke PT

SINGARAJA - Pemerintah Kabupaten Buleleng mengajukan perubahan status Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Buleleng 45. Bank yang selama ini berstatus sebagai perusahaan daerah itu, akan dijadikan perseoran terbatas. Sehingga perusahaan lebih luwes melakukan manuver usaha. Usulan perubahan status itu, diajukan dalam Sidang Paripurna DPRD Buleleng, Senin (28/1) pagi. Dalam sidang itu, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengajukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) untuk mengubah status PD BPR Buleleng 45 menjadi PT BPR Buleleng 45. "Ranperda ini diajukan untuk memenuhi ketentuan pasal 331 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan

perseroan daerah. Sehingga perlu diatur dengan peraturan daerah," kata Agus Suradnyana.

Anggota Komisi III DPRD Buleleng Putu Tirta Adnyana mengatakan, BPR 45 semestinya memang diubah statusnya menjadi perseroan terbatas. Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), mengizinkan pemerintah memiliki perusahaan dengan status perseroan. Menurutnya dengan status PT, BPR 45 akan lebih mudah melakukan manuver bisnis dan lebih kompetitif di bisnis perbankan.

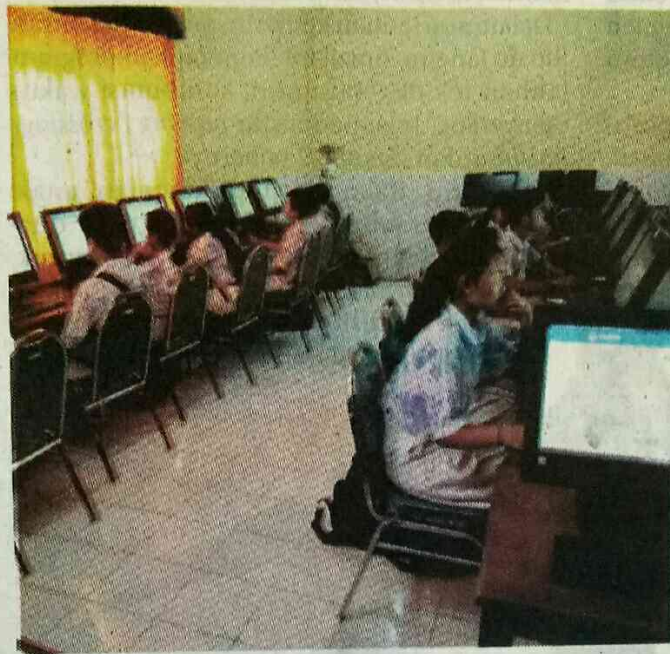
Tirta menilai, dengan kondisi saat ini BPR 45 kesulitan melakukan manuver bisnis. "Malah bisa dibilang bank ini kalah dengan LPD. Bandingkan dengan LPD Bondalem misalnya. Dengan aset Rp 57 miliar, LPD Bondalem itu sudah punya laba Rp 3 miliar. Sedangkan BPR 45, asetnya Rp 30 miliar profitnya baru Rp 1 miliar. Ini kan masih jauh," kata Tirta.

Tirta juga meminta pemerintah mengawal proses pencatatan aset. Terutama dalam proses peralihan. Pemerintah juga harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas, pada perseroan tersebut. (eps/rid)

Media: Radar Bali

Kategori: Pendidikan

UNBK MANDIRI



EKA PRASETYA/RADAR BALI

KURANG: Komputer menjadi kendala pelaksanaan UNBK Mandiri di Buleleng.

17 Siap, 29 Numpang Komputer

SINGARAJA - Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Buleleng rupanya belum banyak yang bisa menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) secara mandiri. Dari 46 sekolah yang siap menyelenggarakan UNBK, hanya 17 sekolah yang melakukan UNBK mandiri. Selebihnya numpang di sekolah lain.

Belasan sekolah yang menyelenggarakan ujian mandiri itu terdiri dari tiga MTs Negeri, sembilan MTs swasta, tiga SMP swasta, dan tiga SMP negeri. SMP negeri yang siap pun hanya SMPN 1 Singaraja, SMPN 7 Singaraja, dan SMPN 1 Seririt.

Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng Made Astika mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan jumlah sekolah yang mengikuti UNBK. Baik secara mandiri maupun numpang di sekolah lain. Buktinya dari 75 SMP/MTs negeri dan swasta, tahun ini sudah 48 sekolah yang ikut UNBK.

"Kalau dengan kondisi saat ini, sebenarnya sudah 52 persen yang siap ikut UNBK. Baik itu mandiri maupun numpang. Kami akan tambah lagi, sehingga bisa 80 persen sekolah yang ikut UNBK," kata Astika saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (28/1).

Menurutnya pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 6,4 miliar untuk pengadaan komputer serta jaringan internet. Dana sebanyak itu akan digunakan untuk membeli 396 unit komputer. Ratusan unit komputer itu akan ditempatkan di sejumlah sekolah yang sudah siap dengan fasilitas ruangan. "Sudah kami beli komputer itu lewat sistem e-purchasing. Jadi tinggal menunggu barangnya datang saja. Bulan Februari ini sudah datang alatnya. Jadi saat ujian nasional, komputer ini sudah benar-benar siap," tukas Astika. (eps/gup)

a Media: RAMA BALI

Kategori: LIMBAH

LINGKUNGAN

Limbah di Bila, DLH Janji Telusuri

SINGARAJA - Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasita Lingkungan Hidup DLH Buleleng Nyoman Suarjana, akan menurunkan tim untuk mengecek kondisi pangkung (jurang) dekat peternakan yang dikelola PT. Anugerah Bersama Sukses (ABS) di Desa Bila. Tim juga akan mengambil sampel dan selanjutnya dilakukan pengecekan di Laboratorium Lingkungan.

"Nanti kami pasti terjunkan tim ke lapangan. Melakukan pengecekan kondisi lapangan, termasuk melakukan pengambilan sampel," kata Suarjana saat ditemui di DLH Buleleng Senin (28/1) siang. Menurutnya pengusaha harus mengikuti ambang baku mutu lingkungan. Selain itu seluruh pengelolaan limbah maupun gangguan, harus mematuhi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Baik itu dalam hal gangguan buyi, maupun gangguan limbah. "Kalau memang ada indikasi gangguan lingkungan, bisa saja kami berikan peringatan. Sedangkan kalau gangguannya itu dikuatkan hasil kajian ilmiah, izin lingkungannya bisa dicabut," tegasnya.

Meski begitu pihaknya tak mau terburu-buru soal kondisi limbah yang dilaporkan warga. Sebab sejauh ini hasil pemantauan DLH Buleleng, kondisi lingkungan setempat masih memenuhi ambang baku mutu lingkungan. Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah warga yang tinggal dekat peternakan babi di Desa Bila menemukan aliran air yang diduga limbah di dekat peternakan. Air itu berwarna coklat pekat dan berbau pesing. Warga mengklaim baunya menyebar hingga ke rumah-rumah penduduk.

Sementara itu pihak perusahaan mengklaim telah mengelola limbah secara maksimal, sesuai dengan persyaratan baku mutu lingkungan. Sementara air yang ditemukan dekat peternakan, disebut air limpahan hujan yang dialirkan melalui selokan. (eps/gup)

Nama Media:

RAJAR MALI

Kategori:

PREMANISME

Dua Preman Diciduk

Dipinjamkan Mobil, Kalah Tajen, Mobil Korban Digadai

SINGARAJA - Air susu dibalas dengan air tuba. Ungkapan itu tepat ditujukan bagi Dewa Made Arnawa, 38. Preman satu ini sudah diberikan pinjaman mobil, tapi malah memeras korban Wayan Sukarsa, 44, sebesar Rp 20 juta bila ingin mobil tersebut kembali. Lho kok? Dalilnya, tersangka butuh uang akibat kalah tajen.

Peristiwa bermula saat korban Sukarsa, warga Kelurahan Banyuning, meminjamkan mobil dengan nomor polisi DK 1440 VI pada tersangka

Arnawa. Saat itu tersangka mengaku hendak menjemput rekannya di Denpasar. Dua hari berselang, mobil korban tak kunjung dikembalikan. Korban pun menelepon tersangka. Namun dengan entengnya, tersangka mengaku mobilnya sudah digadaikan. Apabila ingin mobilnya kembali, korban harus memberikan uang Rp 20 juta untuk menebus mobil tersebut. Bahkan pelaku mengancam akan menghilangkan mobil korban, apabila korban melapor ke polisi.

Tak terima dengan tindakan tersangka, korban pun segera melapor ke polisi. Tersangka kemudian diamankan di wilayah Jalan Pulau Obi, saat hendak menerima uang tebusan dari korban. Korban bersama polisi

berusaha menjebak tersangka. Saat itu korban membawa uang Rp 10 juta dan dijanjikan bertemu di wilayah Pulau Obi. Saat tahu uangnya kurang, tersangka justru marah-marah dan mengancam korban. Saat itu juga polisi langsung menangkap tersangka tanpa perlawanan. "Ternyata mereka ini beraksi berdua. Tersangka juga melibatkan Kadek Jano Artawan. Kami langsung amankan keduanya berikut barang bukti mobil," kata Kapolsek Kota Singaraja AA Wiranata Kusuma di Mapolres Buleleng, Senin (28/1) siang.

Khusus tersangka Artawan, dari hasil pengembangan polisi, berperan sebagai orang yang menunjukkan lokasi menggadaikan mobil. Ternyata mobil itu digadaikan sebesar Rp 10

juta di wilayah Desa Sidatapa. Sementara itu tersangka Arnawa mengaku dirinya nekat menggadaikan mobil itu, karena kalah bermain judi tajen. Mereka kemudian sepakat membuat skenario pemerasan, dengan harapan mendapat uang lebih Rp 10 juta. Sisa uang itu rencananya akan digunakan untuk metajen lagi. "Awalnya kalah metajen di Badung. Saya gadaikan mobilnya di Sidatapa Rp 10 juta. Saya minta tebusan Rp 20 juta. Rencananya sisanya mau saya bagi dua," ujar Arnawa. Kedua tersangka dijerat pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman empat tahun, serta pasal 368 KUHP tentang pengancaman dengan hukuman sembilan bulan penjara. (eps/gup)